



**BUPATI JOMBANG  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI JOMBANG  
NOMOR 6 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**TATA CARA PENGALOKASIAN, PENYALURAN, PENGGUNAAN DAN  
PERTANGGUNGJAWABAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN  
RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA TAHUN 2019**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI JOMBANG,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, maka perlu mengatur Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan dan Pertanggungjawaban Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa Tahun 2019 dalam Peraturan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Acara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5717) ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa
10. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang, Tahun 2016 Nomor 1/D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang, Tahun 2018 Nomor 8/D);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 2/D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 12 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 12/D);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 3/D);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 15 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2019 Nomor 15/A);
14. Peraturan Bupati Jombang Nomor 50 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2017 Nomor 50/A) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Jombang Nomor 28 Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 28/A);
15. Peraturan Bupati Jombang Nomor 42 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 42/E);

3





16. Peraturan Bupati Jombang Nomor 68 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 68/A;

### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN, PENYALURAN, PENGGUNAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA TAHUN 2019.**

### **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Jombang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jombang.
3. Bupati adalah Bupati Jombang.
4. Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang.
5. Badan adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jombang.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten.
7. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Kepala Desa adalah Kepala Pemerintah Desa.
12. Perangkat Desa adalah Sekretariat Desa, Pelaksana Kewilayahan dan Pelaksana Teknis.



14. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, dan Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan selanjutnya disebut dengan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
15. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes terdiri dari pertanggungjawaban pendapatan, belanja dan pembiayaan.
16. Musyawarah Desa, yang selanjutnya disebut dengan Musdes adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
17. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu yang berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
19. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, bimbingan, pelatihan dan konsultasi.

## **BAB II**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dimaksudkan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa, pembinaan kemasyarakatan dan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak.

#### **Pasal 3**

Tujuan PDRD adalah:

- a. Meningkatkan kualitas dan kuantitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. Meningkatkan kuantitas dan kualitas pelaksanaan pembangunan desa;
- c. Meningkatkan pembinaan kemasyarakatan;
- d. Meningkatkan kapasitas pemberdayaan masyarakat desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa;





- e. Memfasilitasi penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak;
- f. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

### **BAB III**

#### **PRINSIP - PRINSIP PENGELOLAAN**

##### **Pasal 4**

- (1) Pengelolaan keuangan dana bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan Desa yang dituangkan dalam Peraturan Desa tentang APBDesa.
- (2) Pengelolaan keuangan sebagaimana dimaksud ayat (1) harus menggunakan prinsip transparan, adil, efisien, efektif, akuntabel, terukur dan terkendali serta dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

### **BAB IV**

#### **TATA CARA PENGALOKASIAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH**

##### **Pasal 5**

Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa ditetapkan paling sedikit sebesar 10 % (sepuluh perseratus) dari realisasi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

##### **Pasal 6**

- (1) Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dihitung berdasarkan ketentuan:
  - a. 60% (enam puluh perseratus) dibagi secara merata kepada seluruh desa; dan
  - b. 40% (empat puluh perseratus) dibagi secara proporsional sesuai realisasi penerimaan Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dari desa masing-masing.
- (2) Ketentuan penghitungan Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk setiap desa yaitu:
  - a. 60% (enam puluh perseratus) Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dibagi secara merata sejumlah desa dengan rumusan:

$\frac{60\% \times \text{Pagu PDRD Kabupaten Tahun 2019}}{\text{Jumlah Desa se-Kabupaten}}$
---



- b. 40% (empat puluh perseratus) Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dibagi secara proporsional sesuai realisasi penerimaan Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dari masing masing desa dibagi total pemasukan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah se-Kabupaten Jombang.

$40\% \times \text{Pagu PDRD Kabupaten 2019} \times$	$\frac{\text{Jumlah kontribusi PDRD dari Desa 2018}}{\text{Total Pemasukan PDRD Se-Kabupaten Jombang}}$
--	---

- (3) Besaran Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk setiap desa tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## **BAB V**

### **PENGANGGARAN**

#### **Pasal 7**

- (1) Penganggaran Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa dialokasikan dalam APBDesa.
- (2) Penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB VI**

### **PENGUNAAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH**

#### **Pasal 8**

Penggunaan Dana Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa untuk membiayai penyelenggaraan kewenangan desa meliputi Bidang:

- a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. Pelaksanaan Pembangunan Desa;
- c. Pembinaan kemasyarakatan Desa;
- d. Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- e. Penanggulangan Bencana, Keadaan darurat dan mendesak desa.

## **BAB VII**

### **TAHAPAN PENYALURAN**

#### **Pasal 9**

Penyaluran Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dari Pemerintah Kabupaten ke Pemerintah Desa dilaksanakan 1 (satu) tahap.

k





## **BAB VIII**

### **MEKANISME PENGAJUAN PENCAIRAN**

#### **Pasal 10**

Mekanisme pengajuan Penyaluran Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah oleh Pemerintah Desa adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Desa mengajukan berkas usulan pencairan kepada Bupati melalui Camat dengan melampirkan:
  - 1) Usulan Kepala desa kepada Bupati melalui Camat;
  - 2) Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah di evaluasi oleh Camat dan ditetapkan oleh Kepala Desa;
  - 3) Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa Tahun Sebelumnya;
  - 4) Rencana penggunaan Dana Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
  - 5) Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan Bendahara Desa;
  - 6) Foto copy KTP Kepala Desa dan Bendahara Desa;
  - 7) Nomor Rekening Kas Desa dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Bendahara Desa;
  - 8) Pakta Integritas dari Kepala Desa bermaterai 6000 (enam ribu rupiah); dan
  - 9) Kwitansi/bukti penerimaan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah bermaterai 6000 (enam ribu rupiah).
- b. Camat menverifikasi persyaratan berkas penyaluran PDRD sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Camat mengajukan Rekap persyaratan penyaluran PDRD yang telah diverifikasi sebagaimana dimaksud huruf b ke Badan.

## **BAB IX**

### **PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

#### **Pasal 11**

- (1) Pembinaan dan Pengawasan penggunaan PDRD di tingkat Kabupaten dilaksanakan oleh Satgas Tingkat Kabupaten yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Pembinaan dan pengawasan oleh Satuan Tugas Tingkat Kabupaten meliputi:
  - a. menyusun pedoman dan memberikan bimbingan, supervisi, konsultasi pelaksanaan pengelolaan dan penggunaan PDRD; dan
  - b. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penggunaan PDRD.
- (3) Pembinaan penggunaan PDRD di tingkat Kecamatan dilaksanakan oleh Satgas Tingkat Kecamatan yang ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (4) Pembinaan dan pengawasan oleh Camat meliputi:



- a. memfasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif dan program pemberdayaan masyarakat Desa;
- b. memfasilitasi penggunaan dan pengelolaan PDRD;
- c. memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi terkait penggunaan dan pengelolaan PDRD;
- d. melakukan pengawasan penggunaan dan pengelolaan PDRD.

## **BAB X PERTANGGUNGJAWABAN**

### **Pasal 12**

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas Penggunaan dana bagian dari hasil PDRD.
- (2) Pertanggungjawaban Penggunaan Bagian Dari hasil PDRD terintegrasi dengan Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB XI KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 13**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jombang.

Ditetapkan di Jombang  
Pada tanggal 11 Januari 2019  
**BUPATI JOMBANG,**



**MUNDJIDAH WAHAB**

Diundangkan di Jombang  
pada tanggal 11 Januari 2019  
**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN JOMBANG,**

  
**AKH. JAZULI**

**BERITA DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2019 NOMOR 6 /E**





LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI JOMBANG  
NOMOR : 6 TAHUN 2019  
TANGGAL: 11 Januari 2019

**BESARAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH  
KEPADA DESA TAHUN 2019**

No	KECAMATAN	DESA	BESARAN PDRD 2019	
1	PERAK	JANTIGANGGONG	48.822.000,00	✓
2	PERAK	KEPUHKAJANG	59.674.000,00	✓
3	PERAK	SUMBERAGUNG	51.228.000,00	✓
4	PERAK	PAGERWOJO	53.887.000,00	✓
5	PERAK	PERAK	49.200.000,00	✓
6	PERAK	SEMBUNG	47.574.000,00	✓
7	PERAK	GLAGAHAN	52.040.000,00	✓
8	PERAK	KALANGSEMANDING	49.800.000,00	✓
9	PERAK	GADINGMANGU	50.487.000,00	✓
10	PERAK	PLOSOGENUK	47.997.000,00	✓
11	PERAK	SUKOREJO	54.613.000,00	✓
12	PERAK	TEMUWULAN	47.583.000,00	✓
13	PERAK	CANGKRINGRANDU	57.706.000,00	✓
14	GUDO	PUCANGRO	61.994.000,00	✓
15	GUDO	KEDUNGTURI	50.434.000,00	✓
16	GUDO	JAPANAN	39.712.000,00	✓
17	GUDO	BLIMBING	41.293.000,00	✓
18	GUDO	MENTAOS	44.594.000,00	✓
19	GUDO	SUKOIBER	54.721.000,00	✓
20	GUDO	SUKOPINGGIR	48.430.000,00	✓
21	GUDO	BUGASURKEDALEMAN	54.621.000,00	✓
22	GUDO	GUDO	41.510.000,00	✓
23	GUDO	PESANGGRAHAN	42.538.000,00	✓
24	GUDO	WANGKALKEPUH	44.721.000,00	✓
25	GUDO	KREMBANGAN	55.169.000,00	✓
26	GUDO	SEPANYUL	52.712.000,00	✓
27	GUDO	GODONG	50.975.000,00	✓
28	GUDO	MEJOYOLOSARI	45.520.000,00	✓
29	GUDO	PLUMBONGAMBANG	52.541.000,00	✓
30	GUDO	GEMPOLLEGUNDI	54.262.000,00	✓
31	GUDO	TANGGUNGAN	52.488.000,00	✓
32	NGORO	JOMBOK	53.617.000,00	✓
33	NGORO	GENUKWATU	53.495.000,00	✓
34	NGORO	REJOAGUNG	56.725.000,00	✓



35	<b>NGORO</b>	KAUMAN	46.334.000,00	✓
36	<b>NGORO</b>	NGORO	54.271.000,00	✓
37	<b>NGORO</b>	BADANG	54.241.000,00	✓
38	<b>NGORO</b>	PULOREJO	64.853.000,00	✓
39	<b>NGORO</b>	BANYUARANG	55.016.000,00	✓
40	<b>NGORO</b>	SIDOWAREK	60.721.000,00	✓
41	<b>NGORO</b>	GAJAH	51.298.000,00	✓
42	<b>NGORO</b>	KESAMBEN	53.984.000,00	✓
43	<b>NGORO</b>	KERTOREJO	49.015.000,00	✓
44	<b>NGORO</b>	SUGIHWARAS	51.992.000,00	✓
45	<b>BARENG</b>	KEBONDALEM	50.190.000,00	✓
46	<b>BARENG</b>	MUNDUSEWU	51.596.000,00	✓
47	<b>BARENG</b>	PAKEL	46.228.000,00	✓
48	<b>BARENG</b>	KARANGAN	51.670.000,00	✓
49	<b>BARENG</b>	NGAMPUNGAN	50.405.000,00	✓
50	<b>BARENG</b>	JENISGELARAN	56.517.000,00	✓
51	<b>BARENG</b>	BARENG	77.922.000,00	✓
52	<b>BARENG</b>	TEBEL	45.589.000,00	✓
53	<b>BARENG</b>	MOJOTENGAH	47.342.000,00	✓
54	<b>BARENG</b>	BANJARAGUNG	61.806.000,00	✓
55	<b>BARENG</b>	NGLEBAK	53.397.000,00	✓
56	<b>BARENG</b>	NGRIMBI	53.326.000,00	✓
57	<b>BARENG</b>	PULOSARI	59.075.000,00	✓
58	<b>WONOSALAM</b>	GALENGDOWO	50.478.000,00	✓
59	<b>WONOSALAM</b>	WONOMERTO	46.638.000,00	✓
60	<b>WONOSALAM</b>	JARAK	56.443.000,00	✓
61	<b>WONOSALAM</b>	SAMBIREJO	50.560.000,00	✓
62	<b>WONOSALAM</b>	WONOSALAM	80.817.000,00	✓
63	<b>WONOSALAM</b>	CARANGWULUNG	60.396.000,00	✓
64	<b>WONOSALAM</b>	WONOKERTO	43.785.000,00	✓
65	<b>WONOSALAM</b>	SUMBERJO	51.307.000,00	✓
66	<b>WONOSALAM</b>	PANGLUNGAN	49.840.000,00	✓
67	<b>MOJOAGUNG</b>	KEDUNGLUMPANG	48.554.000,00	✓
68	<b>MOJOAGUNG</b>	DUKUHMOJO	60.843.000,00	✓
69	<b>MOJOAGUNG</b>	KARANGWINONGAN	47.542.000,00	✓
70	<b>MOJOAGUNG</b>	KADEMANGAN	54.204.000,00	✓
71	<b>MOJOAGUNG</b>	JANTI	44.548.000,00	✓
72	<b>MOJOAGUNG</b>	TEJO	60.242.000,00	✓
73	<b>MOJOAGUNG</b>	GAMBIRAN	41.019.000,00	✓
74	<b>MOJOAGUNG</b>	KAUMAN	36.039.000,00	✓
75	<b>MOJOAGUNG</b>	MOJOTRISNO	46.240.000,00	✓
76	<b>MOJOAGUNG</b>	TANGGALREJO	51.763.000,00	✓



77	<b>MOJOAGUNG</b>	DUKUHDIMORO	51.032.000,00	✓
78	<b>MOJOAGUNG</b>	MIAGAN	43.483.000,00	✓
79	<b>MOJOAGUNG</b>	MANCILAN	59.861.000,00	✓
80	<b>MOJOAGUNG</b>	BETEK	54.445.000,00	✓
81	<b>MOJOAGUNG</b>	KAROBELAH	49.544.000,00	✓
82	<b>MOJOAGUNG</b>	MURUKAN	45.999.000,00	✓
83	<b>MOJOAGUNG</b>	JOHOWINONG	50.658.000,00	✓
84	<b>MOJOAGUNG</b>	SEKETI	34.400.000,00	✓
85	<b>MOJOWARNO</b>	KEDUNGPARI	49.461.000,00	✓
86	<b>MOJOWARNO</b>	KARANGLO	44.762.000,00	✓
87	<b>MOJOWARNO</b>	LATSARI	42.231.000,00	✓
88	<b>MOJOWARNO</b>	MOJOWARNO	46.118.000,00	✓
89	<b>MOJOWARNO</b>	PENGGARON	41.454.000,00	✓
90	<b>MOJOWARNO</b>	MOJODUWUR	49.154.000,00	✓
91	<b>MOJOWARNO</b>	MOJOWANGI	45.728.000,00	✓
92	<b>MOJOWARNO</b>	GONDEK	47.229.000,00	✓
93	<b>MOJOWARNO</b>	GEDANGAN	41.977.000,00	✓
94	<b>MOJOWARNO</b>	MOJOJEJER	43.392.000,00	✓
95	<b>MOJOWARNO</b>	JAPANAN	47.458.000,00	✓
96	<b>MOJOWARNO</b>	MENGANTO	42.369.000,00	✓
97	<b>MOJOWARNO</b>	GROBOGAN	43.214.000,00	✓
98	<b>MOJOWARNO</b>	REJOSLAMET	46.869.000,00	✓
99	<b>MOJOWARNO</b>	SELOREJO	43.676.000,00	✓
100	<b>MOJOWARNO</b>	SIDOKERTO	44.642.000,00	✓
101	<b>MOJOWARNO</b>	SUKOMULYO	38.859.000,00	✓
102	<b>MOJOWARNO</b>	CATAKGAYAM	50.798.000,00	✓
103	<b>MOJOWARNO</b>	WRINGINPITU	44.624.000,00	✓
104	<b>DIWEK</b>	KAYANGAN	50.909.000,00	✓
105	<b>DIWEK</b>	PUTON	44.979.000,00	✓
106	<b>DIWEK</b>	BENDET	39.762.000,00	✓
107	<b>DIWEK</b>	BULUREJO	56.321.000,00	✓
108	<b>DIWEK</b>	GROGOL	58.150.000,00	✓
109	<b>DIWEK</b>	JATIREJO	45.074.000,00	✓
110	<b>DIWEK</b>	CUKIR	53.826.000,00	✓
111	<b>DIWEK</b>	KWARON	49.603.000,00	✓
112	<b>DIWEK</b>	WATUGALUH	44.896.000,00	✓
113	<b>DIWEK</b>	PUNDONG	53.091.000,00	✓
114	<b>DIWEK</b>	DIWEK	38.982.000,00	✓
115	<b>DIWEK</b>	BANDUNG	56.416.000,00	✓
116	<b>DIWEK</b>	KEDAWONG	38.760.000,00	✓
117	<b>DIWEK</b>	NGUDIREJO	43.795.000,00	✓
118	<b>DIWEK</b>	CEWENG	44.389.000,00	✓





119	<b>DIWEK</b>	BALONGBESUK	49.790.000,00	✓
120	<b>DIWEK</b>	PANDANWANGI	52.713.000,00	✓
121	<b>DIWEK</b>	BRAMBANG	38.986.000,00	✓
122	<b>DIWEK</b>	JATIPELEM	43.721.000,00	✓
123	<b>DIWEK</b>	KERAS	57.303.000,00	✓
124	<b>JOMBANG</b>	MOJONGAPIT	51.438.000,00	✓
125	<b>JOMBANG</b>	PLANDI	52.267.000,00	✓
126	<b>JOMBANG</b>	KEPATIHAN	60.138.000,00	✓
127	<b>JOMBANG</b>	PULOLOR	58.173.000,00	✓
128	<b>JOMBANG</b>	SENGON	65.214.000,00	✓
129	<b>JOMBANG</b>	TUNGGORONO	54.900.000,00	✓
130	<b>JOMBANG</b>	DENANYAR	67.666.000,00	✓
131	<b>JOMBANG</b>	JOMBANG	74.944.000,00	✓
132	<b>JOMBANG</b>	CANDIMULYO	64.463.000,00	✓
133	<b>JOMBANG</b>	TAMBAKREJO	44.256.000,00	✓
134	<b>JOMBANG</b>	BANJARDOWO	54.616.000,00	✓
135	<b>JOMBANG</b>	SAMBONGDUKU	61.749.000,00	✓
136	<b>JOMBANG</b>	DAPURKEJAMBON	43.093.000,00	✓
137	<b>JOMBANG</b>	JABON	41.239.000,00	✓
138	<b>JOMBANG</b>	PLOSOGENENG	49.810.000,00	✓
139	<b>JOMBANG</b>	SUMBERJO	40.642.000,00	✓
140	<b>PETERONGAN</b>	PETERONGAN	52.357.000,00	✓
141	<b>PETERONGAN</b>	KEPLAKSARI	46.679.000,00	✓
142	<b>PETERONGAN</b>	KEPUHKEMBENG	64.150.000,00	✓
143	<b>PETERONGAN</b>	MANCAR	55.618.000,00	✓
144	<b>PETERONGAN</b>	TUGUSUMBERJO	56.707.000,00	✓
145	<b>PETERONGAN</b>	MOROSUNGGINGAN	55.568.000,00	✓
146	<b>PETERONGAN</b>	KEBONTEMU	43.130.000,00	✓
147	<b>PETERONGAN</b>	DUKUHKLOPO	48.187.000,00	✓
148	<b>PETERONGAN</b>	TANJUNGGUNUNG	45.775.000,00	✓
149	<b>PETERONGAN</b>	BONGKOT	48.956.000,00	✓
150	<b>PETERONGAN</b>	SENDEN	41.016.000,00	✓
151	<b>PETERONGAN</b>	NGRANDULOR	53.254.000,00	✓
152	<b>PETERONGAN</b>	TENGARAN	47.008.000,00	✓
153	<b>PETERONGAN</b>	SUMBERAGUNG	45.793.000,00	✓
154	<b>SUMOBITO</b>	PLOKOKEREP	52.360.000,00	✓
155	<b>SUMOBITO</b>	JOGOLOYO	57.506.000,00	✓
156	<b>SUMOBITO</b>	PALREJO	55.733.000,00	✓
157	<b>SUMOBITO</b>	PLEMAHAN	55.005.000,00	✓
158	<b>SUMOBITO</b>	BRUDU	58.158.000,00	✓
159	<b>SUMOBITO</b>	BADAS	55.494.000,00	✓
160	<b>SUMOBITO</b>	NGLELE	46.268.000,00	✓





161	<b>SUMOBITO</b>	TRAWASAN	47.878.000,00	✓
162	<b>SUMOBITO</b>	SEBANI	50.501.000,00	✓
163	<b>SUMOBITO</b>	MLARAS	49.655.000,00	✓
164	<b>SUMOBITO</b>	SEGODOREJO	49.786.000,00	✓
165	<b>SUMOBITO</b>	KEDUNG PAPAR	53.794.000,00	✓
166	<b>SUMOBITO</b>	SUMOBITO	48.809.000,00	✓
167	<b>SUMOBITO</b>	CURAHMALANG	68.509.000,00	✓
168	<b>SUMOBITO</b>	BUDUG SIDOREJO	57.027.000,00	✓
169	<b>SUMOBITO</b>	KENDALSARI	56.876.000,00	✓
170	<b>SUMOBITO</b>	TALUNKIDUL	45.819.000,00	✓
171	<b>SUMOBITO</b>	MADIOPURO	45.872.000,00	✓
172	<b>SUMOBITO</b>	BAKALAN	44.579.000,00	✓
173	<b>SUMOBITO</b>	GEDANGAN	52.339.000,00	✓
174	<b>SUMOBITO</b>	MENTURO	52.321.000,00	✓
175	<b>KESAMBEN</b>	KEDUNGBETIK	60.469.000,00	✓
176	<b>KESAMBEN</b>	KEDUNGMLATI	48.403.000,00	✓
177	<b>KESAMBEN</b>	WATUDAKON	57.790.000,00	✓
178	<b>KESAMBEN</b>	CARANGREJO	55.119.000,00	✓
179	<b>KESAMBEN</b>	JOMBOK	66.571.000,00	✓
180	<b>KESAMBEN</b>	BLIMBING	49.179.000,00	✓
181	<b>KESAMBEN</b>	WULUH	50.648.000,00	✓
182	<b>KESAMBEN</b>	POJOKREJO	61.090.000,00	✓
183	<b>KESAMBEN</b>	KESAMBEN	52.231.000,00	✓
184	<b>KESAMBEN</b>	PODOROTO	58.565.000,00	✓
185	<b>KESAMBEN</b>	JOMBATAN	60.288.000,00	✓
186	<b>KESAMBEN</b>	POJOKKULON	47.038.000,00	✓
187	<b>KESAMBEN</b>	GUMULAN	44.624.000,00	✓
188	<b>KESAMBEN</b>	JATIDUWUR	42.997.000,00	✓
189	<b>TEMBELANG</b>	MOJOKRAPAK	57.512.000,00	✓
190	<b>TEMBELANG</b>	PESANTREN	46.623.000,00	✓
191	<b>TEMBELANG</b>	TAMPINGMOJO	46.872.000,00	✓
192	<b>TEMBELANG</b>	KALIKEJAMBON	42.507.000,00	✓
193	<b>TEMBELANG</b>	KEDUNGLOSARI	47.314.000,00	✓
194	<b>TEMBELANG</b>	KEDUNGOTOK	48.083.000,00	✓
195	<b>TEMBELANG</b>	TEMBELANG	43.872.000,00	✓
196	<b>TEMBELANG</b>	SENTUL	46.566.000,00	✓
197	<b>TEMBELANG</b>	GABUSBANARAN	38.783.000,00	✓
198	<b>TEMBELANG</b>	PULOREJO	50.416.000,00	✓
199	<b>TEMBELANG</b>	REJOSOPINGGIR	55.274.000,00	✓
200	<b>TEMBELANG</b>	JATIWATES	51.762.000,00	✓
201	<b>TEMBELANG</b>	KEPUHDOKO	41.875.000,00	✓
202	<b>TEMBELANG</b>	PULOGEDANG	43.590.000,00	✓





203	<b>TEMBELANG</b>	BEDAHLAWAK	39.036.000,00	✓
204	<b>PLOSO</b>	TANGGUNGKRAMAT	46.286.000,00	✓
205	<b>PLOSO</b>	REJOAGUNG	52.580.000,00	✓
206	<b>PLOSO</b>	LOSARI	38.820.000,00	✓
207	<b>PLOSO</b>	PLOSO	43.281.000,00	✓
208	<b>PLOSO</b>	JATIGEDONG	54.899.000,00	✓
209	<b>PLOSO</b>	DADITUNGGAL	37.220.000,00	✓
210	<b>PLOSO</b>	KEDUNGOMBO	37.197.000,00	✓
211	<b>PLOSO</b>	JATIBANJAR	45.511.000,00	✓
212	<b>PLOSO</b>	PAGERTANJUNG	40.536.000,00	✓
213	<b>PLOSO</b>	PANDANBOLE	34.993.000,00	✓
214	<b>PLOSO</b>	KEDUNGOWO	40.372.000,00	✓
215	<b>PLOSO</b>	KEBONAGUNG	36.489.000,00	✓
216	<b>PLOSO</b>	BAWANGAN	36.363.000,00	✓
217	<b>PLANDAAN</b>	KLITIH	38.105.000,00	✓
218	<b>PLANDAAN</b>	PLABUHAN	39.896.000,00	✓
219	<b>PLANDAAN</b>	KAMPUNGBARU	40.818.000,00	✓
220	<b>PLANDAAN</b>	GEBANGBUNDER	43.024.000,00	✓
221	<b>PLANDAAN</b>	JATIMLEREK	43.546.000,00	✓
222	<b>PLANDAAN</b>	KARANGMOJO	49.243.000,00	✓
223	<b>PLANDAAN</b>	PLANDAAN	43.845.000,00	✓
224	<b>PLANDAAN</b>	BANGSRI	44.645.000,00	✓
225	<b>PLANDAAN</b>	PURISEMANDING	48.263.000,00	✓
226	<b>PLANDAAN</b>	TONDOWULAN	42.797.000,00	✓
227	<b>PLANDAAN</b>	DARUREJO	52.592.000,00	✓
228	<b>PLANDAAN</b>	SUMBERJO	40.393.000,00	✓
229	<b>PLANDAAN</b>	JIPORAPAH	34.207.000,00	✓
230	<b>KABUH</b>	MARMOYO	33.355.000,00	✓
231	<b>KABUH</b>	TANJUNGWADUNG	39.919.000,00	✓
232	<b>KABUH</b>	MANGUNAN	45.198.000,00	✓
233	<b>KABUH</b>	KABUH	49.468.000,00	✓
234	<b>KABUH</b>	KEDUNGJATI	41.036.000,00	✓
235	<b>KABUH</b>	BANJARDOWO	39.342.000,00	✓
236	<b>KABUH</b>	KARANGPAKIS	53.455.000,00	✓
237	<b>KABUH</b>	SUMBERINGIN	38.937.000,00	✓
238	<b>KABUH</b>	SUMBERGONDANG	44.763.000,00	✓
239	<b>KABUH</b>	KAUMAN	41.341.000,00	✓
240	<b>KABUH</b>	MUNUNGKEREP	37.505.000,00	✓
241	<b>KABUH</b>	GENENGANJASEM	38.865.000,00	✓
242	<b>KABUH</b>	MANDURO	42.716.000,00	✓
243	<b>KABUH</b>	SUKODADI	45.897.000,00	✓
244	<b>KABUH</b>	PENGAMPON	41.661.000,00	✓





245	<b>KABUH</b>	SUMBERAJI	34.434.000,00	✓
246	<b>KUDU</b>	SIDOKATON	38.736.000,00	✓
247	<b>KUDU</b>	TAPEN	43.753.000,00	✓
248	<b>KUDU</b>	BAKALANRAYUNG	43.706.000,00	✓
249	<b>KUDU</b>	RANDUWATANG	40.015.000,00	✓
250	<b>KUDU</b>	SUMBERTEGUH	43.990.000,00	✓
251	<b>KUDU</b>	MENTURUS	39.266.000,00	✓
252	<b>KUDU</b>	KUDUBANJAR	43.612.000,00	✓
253	<b>KUDU</b>	MADE	36.335.000,00	✓
254	<b>KUDU</b>	KEPUHREJO	38.030.000,00	✓
255	<b>KUDU</b>	BENDUNGAN	40.214.000,00	✓
256	<b>KUDU</b>	KATEMAS	45.955.000,00	✓
257	<b>BANDAR KEDUNG MULYO</b>	BANDAR KEDUNG MULYO	47.364.000,00	✓
258	<b>BANDAR KEDUNG MULYO</b>	MOJOKAMBANG	39.882.000,00	✓
259	<b>BANDAR KEDUNG MULYO</b>	BARONGSAWAHAN	47.052.000,00	✓
260	<b>BANDAR KEDUNG MULYO</b>	KAYEN	59.673.000,00	✓
261	<b>BANDAR KEDUNG MULYO</b>	GONDANGMANIS	46.066.000,00	✓
262	<b>BANDAR KEDUNG MULYO</b>	BRODOT	44.374.000,00	✓
263	<b>BANDAR KEDUNG MULYO</b>	PUCANGSIMO	51.660.000,00	✓
264	<b>BANDAR KEDUNG MULYO</b>	BANJARSARI	45.539.000,00	✓
265	<b>BANDAR KEDUNG MULYO</b>	BRANGKAL	55.322.000,00	✓
266	<b>BANDAR KEDUNG MULYO</b>	KARANGDAGANGAN	51.848.000,00	✓
267	<b>BANDAR KEDUNG MULYO</b>	TINGGAR	53.232.000,00	✓
268	<b>JOGOROTO</b>	JOGOROTO	68.304.000,00	✓
269	<b>JOGOROTO</b>	JARAKKULON	41.097.000,00	✓
270	<b>JOGOROTO</b>	ALANG-ALANG CARUBAN	48.261.000,00	✓
271	<b>JOGOROTO</b>	SUKOSARI	48.905.000,00	✓
272	<b>JOGOROTO</b>	SAWIJI	50.083.000,00	✓
273	<b>JOGOROTO</b>	MAYANGAN	51.494.000,00	✓
274	<b>JOGOROTO</b>	SUMBERMULYO	57.711.000,00	✓
275	<b>JOGOROTO</b>	NGUMPUL	54.345.000,00	✓
276	<b>JOGOROTO</b>	TAMBAR	40.350.000,00	✓
277	<b>JOGOROTO</b>	JANTI	45.850.000,00	✓
278	<b>JOGOROTO</b>	SAMBIREJO	45.424.000,00	✓
279	<b>MEGALUH</b>	TURIPINGGIR	49.018.000,00	✓
280	<b>MEGALUH</b>	GONGSENG	55.124.000,00	✓



281	<b>MEGALUH</b>	MEGALUH	50.822.000,00
282	<b>MEGALUH</b>	SUDIMORO	51.439.000,00
283	<b>MEGALUH</b>	BALONGSARI	52.509.000,00
284	<b>MEGALUH</b>	SUMBERSARI	45.928.000,00
285	<b>MEGALUH</b>	NGOGRI	58.064.000,00
286	<b>MEGALUH</b>	SIDOMULYO	51.547.000,00
287	<b>MEGALUH</b>	BALONGGEMEK	44.498.000,00
288	<b>MEGALUH</b>	DUKU HARUM	41.704.000,00
289	<b>MEGALUH</b>	SUMBERAGUNG	48.849.000,00
290	<b>MEGALUH</b>	PACARPELUK	41.881.000,00
291	<b>MEGALUH</b>	KEDUNGREJO	45.103.000,00
292	<b>NGUSIKAN</b>	KETAPANGKUNING	40.225.000,00
293	<b>NGUSIKAN</b>	KEBOAN	44.728.000,00
294	<b>NGUSIKAN</b>	KEDUNGBOGO	40.042.000,00
295	<b>NGUSIKAN</b>	NGUSIKAN	45.722.000,00
296	<b>NGUSIKAN</b>	SUMBERNONGKO	46.622.000,00
297	<b>NGUSIKAN</b>	CUPAK	31.462.000,00
298	<b>NGUSIKAN</b>	MANUNGGAL	39.549.000,00
299	<b>NGUSIKAN</b>	NGAMPEL	34.234.000,00
300	<b>NGUSIKAN</b>	MOJODANU	33.378.000,00
301	<b>NGUSIKAN</b>	KROMONG	30.784.593,00
302	<b>NGUSIKAN</b>	ASEMGEDE	31.300.000,00
<b>JUMLAH</b>			<b>14.679.617.593,00</b>

**BUPATI JOMBANG.**

*Mundjidah Wahab*  
**MUNDJIDAH WAHAB**

